



Gambaran Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kesehatan dengan Kasus Hipertensi dan Diabetes Melitus di Jawa Timur Tahun 2022

Rindy Asti Pratami¹, Maki Zamzam^{2*}, Faridha Cahyani³

^{1,2*}S1 Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kesehatan, Universitas Nahdlatul Ulama
Surabaya

³Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur

Email: rindyasti063.km19@student.unusa.ac.id

Abstract

Quality Service Standards or SPM are regulations regarding the type and quality of basic services that must be owned by the state, which at least are obtained by every citizen without exception. The prevalence of hypertension in East Java Province is 36.32%, while the prevalence of Diabetes Mellitus (DM) is 2.6%. This value is estimated by the large population in East Java who suffer from hypertension and DM. The purpose of this study was to describe the description of the achievement of Minimum Service Standards (MSS) indicators in the health sector in cases of hypertension and diabetes mellitus in East Java Province in 2022. The research method was a descriptive study with a retrospective design using secondary data screening on the achievement of MSS service targets in the health sector in cases of hypertension and diabetes mellitus in East Java Province. The research results obtained were that the percentage of achievement of MSS in the health sector in cases of hypertension and DM had increased from 2020 to 2022. As many as 38 regencies/cities in East Java Province had total achievement of MSS for hypertension and DM services in East Java Province at number 58% and 96%. As many as 17 out of 38 districts/cities in East Java Province whose percentage score for achievement of MSS is below the total percentage for achievement of hypertension MSS in East Java Province. Meanwhile, in the achievement of MSS DM, as many as 7 out of 38 districts/cities in East Java Province still have not reached the total percentage of achievement of the MSS DM target.

Keywords: Hypertension, Diabetes Mellitus, SPM

Abstrak

Standar Pelayanan Mutu atau SPM merupakan peraturan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang wajib dimiliki negara yang minimal didapatkan oleh setiap warga negara tanpa terkecuali. Prevalensi hipertensi di Provinsi Jawa Timur adalah sebesar 36,32%, sedangkan prevalensi Diabetes Melitus (DM) sebesar 2,6% nilai tersebut diperkirakan banyaknya penduduk di Jawa Timur yang menderita Hipertensi dan DM. Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan gambaran dalam pencapaian indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang kesehatan pada kasus hipertensi dan diabetes melitus di Provinsi Jawa Timur tahun 2022. Metode penelitian yaitu penelitian

deskriptif dengan rancangan retropektif menggunakan skrining data sekunder capaian sasaran pelayanan SPM bidang kesehatan pada kasus hipertensi dan diabetes melitus di Provinsi Jawa Timur. Hasil penelitian yang didapatkan yaitu persentase capaian SPM di bidang kesehatan pada kasus Hipertensi dan DM mengalami peningkatan pada tahun 2020 hingga tahun 2022. Sebanyak 38 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur memiliki total capaian SPM untuk pelayanan Hipertensi dan DM di Provinsi Jawa Timur berada di angka 58% dan 96%. Sebanyak 17 dari 38 Kab/Kota di Provinsi Jawa Timur yang nilai persentase capaian SPM di bawah nilai total persentase capaian SPM hipertensi di Provinsi Jawa Timur. Sedangkan pada capaian SPM DM sebanyak 7 dari 38 Kab/Kota di Provinsi Jawa Timur masih belum mencapai total persentase capaian target SPM DM.

Kata Kunci: Hipertensi, Diabetes Melitus, SPM

PENDAHULUAN

Kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang tertuang dalam UUD 1945 mengatur tentang hak-hak dasar warga negara, antara lain akses terhadap pendidikan, kesehatan, pekerjaan, penghidupan yang layak, dan jaminan sosial (Aliyah, 2020).

Pada Peraturan Pemerintah RI No. 02 Tahun 2018, Standar Pelayanan Minimal atau SPM merupakan peraturan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang wajib dimiliki negara yang minimal didapatkan oleh setiap warga negara tanpa terkecuali. Urusan pemerintahan wajib adalah urusan pemerintahan yang harus diurus pada semua bidang di bawah pimpinan kepala daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam wilayah hukumnya (Rustandi, 2017). SPM ditetapkan untuk memastikan dan mendukung pelaksanaan daerah sekaligus sebagai tanggung jawab pemerintah daerah terhadap masyarakat.

Pada UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah disebutkan bahwa penyelenggaraan pemerintah daerah diarahkan dalam percepatan terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Oleh karena itu, untuk memenuhi pelayanan dasar tersebut perlu adanya penetapan Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada bidang kesehatan salah satu standar yang wajib diberikan pada masyarakat negara tersebut. Pada tentang standar teknis pemenuhan mutu pelayanan dasar pada SPM bidang kesehatan yaitu:

- a) Pelayanan kesehatan ibu hamil;
- b) Pelayanan kesehatan ibu bersalin;
- c) Pelayanan kesehatan bayi baru lahir;
- d) Pelayanan kesehatan balita;
- e) Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar;
- f) Pelayanan kesehatan pada usia produktif;
- g) Pelayanan kesehatan pada usia lanjut;
- h) Pelayanan kesehatan penderita hipertensi;
- i) Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus;
- j) Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat;
- k) Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis;
- l) Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)

Upaya dalam mencapai SPM masih mengalami beberapa hambatan dan tantangan seperti sumber daya manusia penyusun anggaran yang kurang dalam memahami indikator pencapaian SPM selain itu hal lainnya seperti kurangnya anggaran pemerintah daerah dan

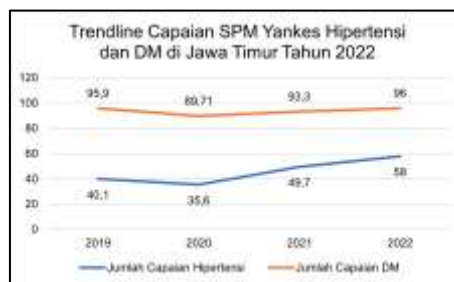
evaluasi keberhasilan pelaksanaan SPM masih kurang (Jaswin et al., 2019). Menurut Suartini et al., (2020) menyebutkan bahwa pelaksanaan SPM kesehatan jiwa kurang maksimal karena kurangnya tenaga kesehatan jiwa di puskesmas.

Berdasarkan Kemenkes RI, (2018), prevalensi hipertensi di Provinsi Jawa Timur adalah 36,32% nilai tersebut juga menjadi perkiraan banyaknya penduduk di Jawa Timur yang menderita hipertensi, sedangkan prevalensi Diabetes Melitus (DM) di Provinsi Jawa Timur adalah 2,6% nilai tersebut diperkirakan banyaknya penduduk di Jawa Timur yang menderita DM. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendiskripsikan gambaran dalam pencapaian indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang kesehatan pada kasus hipertensi dan diabetes melitus di Provinsi Jawa Timur tahun 2022.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan rancangan retropektif. Artikel ini menggunakan skrining data sekunder capaian sasaran pelayanan SPM bidang kesehatan pada kasus hipertensi dan diabetes melitus di Provinsi Jawa Timur. Skrining pasien hipertensi dan diabetes melitus di Provinsi Jawa Timur dilakukan sejak bulan Januari hingga Desember tahun 2022. Lokasi penelitian di Provinsi Jawa Timur yang dilakukan oleh Puskesmas kemudian dilaporkan secara berkala ke Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota kemudian dilanjutkan pelaporan pada Dinas Provinsi Jawa Timur.

HASIL



Gambar 1.1 *Trendline* Capaian SPM Yankes Hipertensi dan DM tahun 2019-2022 di Jawa Timur menurut Profil Kesehatan Provinsi Jawa Timur tahun 2019-2022

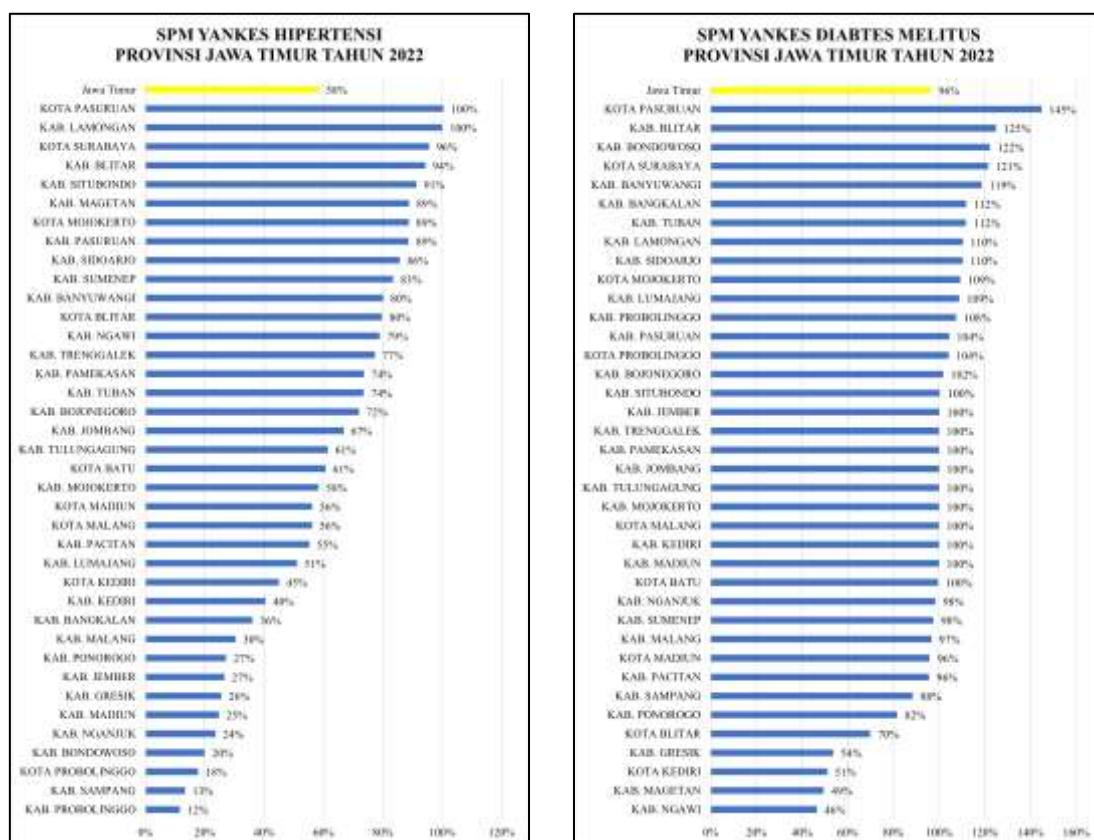
Pada gambar 1.1 menjelaskan bahwa terdapat peningkatan capaian SPM di Bidang Kesehatan pada kasus hipertensi dan diabetes melitus di Provinsi Jawa Timur. Pada kasus hipertensi dengan persentase capaian 56% sedangkan pada kasus diabetes melitus sebesar 96%.

Tabel 1.1 Hasil capaian SPM bidang kesehatan kasus Hipertensi dan DM tahun 2022

No.	Kab/Kota	Yankes Hipertensi			Yankes DM		
		SASARAN	CAPAIAN	%	SASARAN	CAPAIAN	%
1	KAB. PACITAN	170.908	94.432	55%	7.635	8.212	108%
2	KAB. PONOROGO	290.959	79.109	27%	15.771	13.939	88%
3	KAB. TRENGGALEK	277.484	214.515	77%	13.492	14.062	104%
4	KAB. TULUNGAGUNG	298.696	183.477	61%	16.184	19.785	122%
5	KAB. BLITAR	373.378	352.238	94%	25.804	25.380	98%
6	KAB. KEDIRI	450.126	181.994	40%	48.164	48.164	100%
7	KAB. MALANG	823.851	250.168	30%	42.000	22.532	54%
8	KAB. LUMAJANG	284.001	144.953	51%	21.846	21.877	100%
9	KAB. JEMBER	767.032	203.770	27%	38.018	31.037	82%
10	KAB. BANYUWANGI	488.737	391.417	80%	27.244	26.329	97%
11	KAB. BONDOWOSO	201.561	40.228	20%	12.717	14.221	112%
12	KAB. SITUBONDO	148.069	135.274	91%	15.462	15.462	100%
13	KAB. PROBOLINGGO	290.512	33.688	12%	22.494	11.493	51%
14	KAB. PASURUAN	402.655	357.100	89%	26.695	29.041	109%
15	KAB. SIDOARJO	589.521	504.872	86%	77.136	73.759	96%
16	KAB. MOJOKERTO	345.095	201.294	58%	18.609	18.609	100%
17	KAB. JOMBANG	385.457	257.586	67%	35.133	33.690	96%
18	KAB. NGANJUK	381.081	90.038	24%	22.018	22.018	100%
19	KAB. MADIUN	239.829	59.249	25%	17.381	17.296	100%
20	KAB. MAGETAN	211.764	188.092	89%	13.664	13.664	100%
21	KAB. NGAWI	272.719	215.085	79%	28.432	28.432	100%
22	KAB. BOJONEGORO	387.013	278.606	72%	23.363	23.794	102%
23	KAB. TUBAN	305.004	224.208	74%	16.203	18.115	112%
24	KAB. LAMONGAN	336.361	336.361	100%	23.264	23.264	100%
25	KAB. GRESIK	383.331	98.180	26%	45.284	45.284	100%
26	KAB. BANGKALAN	287.891	103.827	36%	14.180	6.592	46%
27	KAB. SAMPANG	277.384	36.998	13%	11.276	7.880	70%
28	KAB. PAMEKASAN	235.914	173.634	74%	10.720	12.723	119%
29	KAB. SUMENEP	302.714	252.714	83%	11.997	11.698	98%
30	KOTA KEDIRI	84.917	38.204	45%	7.954	8.784	110%
31	KOTA BLITAR	46.645	37.170	80%	4.240	4.427	104%
32	KOTA MALANG	228.720	128.525	56%	22.227	24.291	109%
33	KOTA PROBOLINGGO	60.563	10.743	18%	8.679	4.296	49%
34	KOTA PASURUAN	52.198	52.402	100%	5.817	5.839	100%

No.	Kab/Kota	Yankes Hipertensi			Yankes DM		
		SASARAN	CAPAIAN	%	SASARAN	CAPAIAN	%
35	KOTA MOJOKERTO	37.468	33.244	89%	5.100	6.375	125%
36	KOTA MADIUN	68.973	38.781	56%	8.143	9.890	121%
37	KOTA SURABAYA	740.719	708.121	96%	96.732	106.860	110%
38	KOTA BATU	46.167	28.022	61%	2.611	3.782	145%
JUMLAH		11.575.417	6.758.319	58%	863.689	832.896	96%

Tabel 1.1 Memuat informasi capaian pelayanan SPM hipertensi dan diabetes melitus kabupaten atau kota di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2022. Sebanyak 38 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur memiliki jumlah target sasaran untuk skrining hipertensi diperkirakan 11.575.417 kasus dengan realisasi pencapaian 6.758.319 kasus, sedangkan pada kasus diabetes melitus angka target sasaran diperkirakan 863.689 kasus dengan realisasi pencapaian sebesar 832.896 kasus.



Gambar 1.2 Persentase capaian SPM pelayanan hipertensi dan diabetes melitus Kab/Kota di Provinsi Jawa Timur tahun 2022

Sumber gambar: Data SPM Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur

Total capaian SPM untuk pelayanan hipertensi di Provinsi Jawa Timur berada di angka 58% dan diabetes berada pada angka 96%. Hasil tersebut didapatkan dari target sasaran kasus hipertensi di Provinsi Jawa Timur sebesar 11.575.417 kasus yang terealisasi dibagi dengan angka pencapaian 6.758.319 kasus dikalikan 100%. Sedangkan pada kasus diabetes melitus dengan target sasaran sebesar 863.689 kasus yang terealisasi dibagi dengan angka pencapaian 832.896 kasus dikalikan 100%.

PEMBAHASAN

Pada gambar 1.1 yang menjelaskan bahwa terdapat peningkatan capaian SPM di Bidang Kesehatan pada kasus hipertensi dan diabetes melitus di Provinsi Jawa Timur. Sebanyak 38 Kabupaten/Kota yang berada di Jawa Timur masih belum sepenuhnya mencapai target sasaran, akan tetapi pada jumlah capaian diabetes melitus hampir mendekati angka 100%.

Jumlah capaian skrining hipertensi di Provinsi Jawa Timur mengalami peningkatan pada tahun 2020 hingga 2022. Peningkatan pada tahun 2021 menuju tahun 2022 sebesar 8,3%.

Pada jumlah capaian skrining DM pada tahun 2019 menuju tahun 2020 mengalami penurunan yakni pada tahun 2019 sebesar 95,9% menurun menjadi 89,71. Pada tahun berikutnya terjadi peningkatan setiap tahunnya yang meningkat sekitar 3%.

Tabel 1 memuat informasi capaian pelayanan SPM hipertensi dan diabetes melitus kabupaten atau kota di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2022. Sebanyak 38 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur, jumlah target sasaran untuk skrining hipertensi diperkirakan 11.575.417 kasus dengan realisasi pencapaian 6.758.319 kasus.

Sasaran target tertinggi pada skrining hipertensi yaitu terdapat di kabupaten Malang sebanyak 823.851 kasus, kab. Jember sebanyak 767.032 kasus, kota Surabaya 740.719 kasus. Sedangkan kab/kota dengan target sasaran skrining terendah ditempati oleh kota Mojokerto sebanyak 37.468 kasus, kota Batu sebanyak 46.167 kasus, dan kota Blitar sebanyak 46.645 kasus.

Dari target sasaran skrining hipertensi sebanyak 11.575.417 kasus, realisasi capaian jumlah pelayanan hipertensi di Provinsi Jawa timur sebanyak 6.758.319 kasus. Kontribusi tertinggi angka realisasi capaian hipertensi di Provinsi Jawa timur berasal dari Kota Surabaya sebanyak 708.121 kasus kemudian disusul oleh Kab. Sidoarjo sebanyak 504.872 kasus.

Sedangkan realisasi capaian jumlah pelayanan skrining hipertensi terendah di Provinsi Jawa Timur berasal dari Kota Probolinggo sebesar 10.743 kasus, disusul Kota Batu sebanyak 28.022 kasus, Kota Mojokerto sebanyak 33.244 kasus.

Untuk kasus diabetes melitus angka target sasaran diperkirakan 863.689 kasus dengan realisasi pencapaian sebesar 832.896 kasus. Sasaran target tertinggi pada skrining diabetes melitus terdapat di Kota Surabaya sebesar 96.732 kasus, Kab. Sidoarjo sebesar 77.136 kasus, dan Kab. Kediri sebesar 48.164 kasus. Sedangkan Kab/Kota dengan target sasaran skrining terendah ditempati oleh Kota Batu sebesar 2.611 kasus, Kota Blitar 4.240 kasus, dan Kota Mojokerto 6.375 kasus.

Kontribusi tertinggi pada realisasi capaian skrining diabetes melitus di Provinsi Jawa Timur berasal dari Kota Surabaya sebanyak 106.860 kasus, disusul Kab. Sidoarjo 73.759 kasus, kemudian Kab. Kediri 48.164 kasus. Sedangkan realisasi capaian jumlah pelayanan skrining diabetes melitus terendah di Provinsi Jawa Timur berasal dari Kota Batu sebesar 3.782 kasus, Kota Probolinggo 4.296 kasus, dan Kota Blitar 4.427 kasus.

Total capaian SPM untuk pelayanan hipertensi di Provinsi Jawa Timur berada di angka 58%. Hasil tersebut didapatkan dari target sasaran kasus hipertensi di Provinsi Jawa Timur sebesar 11.575.417 kasus yang terealisasi dibagi dengan angka pencapaian 6.758.319 kasus dikalikan 100%.

Sebanyak 17 dari 38 Kab/Kota di Provinsi Jawa Timur yang nilai persentase capaian SPM di bawah nilai total persentase capaian SPM hipertensi di Provinsi Jawa Timur. Kab/Kota yang memiliki nilai persentase capaian SPM terendah yaitu Kab. Probolinggo sebesar 12%, Kab. Sampang sebesar 13%, dan Kota Probolinggo sebesar 18%. Hal tersebut berbeda dari tahun-tahun sebelumnya pada Profil Kesehatan Provinsi

Jawa Timur tahun 2020 dan tahun 2021, pada tahun 2021 Kab/Kota yang memiliki nilai persentase terendah yaitu Kota Blitar sebesar 9,31%, Kab.Probolinggo 9,44%, disusul Kab. Madiun sebesar 10,04%. Sedangkan pada tahun 2020 Kab/Kota yang memiliki nilai persentase terendah yaitu Kota Blitar 0,9%, Kab.Probolinggo 0,09%, dan Kab.Madiun 10% (Dinkes Jawa Timur, 2020).

Pada Kab/Kota yang memiliki nilai persentase capaian tertinggi pada tahun 2022 yaitu Kab. Lamongan sebesar 100%, Kota Pasuruan sebesar 100%, Kota Surabaya sebesar 96%. Nilai persentase capaian tertinggi pada tahun 2021 dan tahun 2020 yaitu Kab. Lamongan sebesar 96%, Kota Surabaya sebesar 84%, dan Kab. Tulungagung sebesar 74%.

Pada skrining diabetes melitus sebanyak 7 dari 38 Kab/Kota di Provinsi Jawa Timur masih belum mencapai total persentase capaian SPM diabetes melitus di Provinsi Jawa Timur yaitu sebesar 96%. Kab/Kota yang memiliki nilai persentase terendah yaitu Kab. Bangkalan (46%), Kota Probolinggo (49%), dan Kab. Probolinggo (51%). Pada tahun 2021 Kab/Kota yang memiliki nilai persentase terendah adalah Kab.Probolinggo (52%), Kab. Malang (63%), dan Kab. Ponorogo (70%). Hasil yang berbeda pada Kab/Kota yang memiliki persentase capaian SPM DM terendah pada tahun 2020 yaitu Kab.Madiun (32%), Kota Blitar (43%), dan Kab. Kediri (48%).

Kab/Kota yang memiliki nilai persentase capaian tertinggi yaitu Kota Batu (145%), Kota Mojokerto (125%), dan Kab. Tulungagung sebesar (122%). Pada tahun 2021, Kota Mojokerto (124%), Kab. Magetan (124%), dan Kab. Trenggalek (119%) merupakan Kab/Kota yang memiliki nilai persentase capaian tertinggi. Sedangkan pada tahun 2020 yakni pada Kab. Sumenep (333%), Kab. Tulungagung (155%), dan Kota Mojokerto (142%).

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan disimpulkan bahwa target sasaran capaian SPM bidang kesehatan dengan kasus hipertensi dan diabetes melitus di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2022 yaitu sebesar 11.575.417 kasus hipertensi dan 863.689 kasus diabetes melitus. Realisasi presentase capaian SPM untuk kasus hipertensi sebesar 58% dan 96% kasus diabetes melitus. Berdasarkan hasil tersebut terdapat beberapa kabupaten atau kota yang berada di Jawa Timur masih belum mencapai target rata rata capaian SPM dibidang kesehatan dengan kasus hipertensi. Sedangkan pada kasus diabetes melitus, sebagian besar kabupaten/kota telah mencapai target rata rata capaian SPM dibidang kesehatan. Terjadi peningkatan persentase capaian SPM bidang kesehatan kasus hipertensi dan DM setiap tahunnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Aliyah, Y. A. nurul. (2020). Capaian Standar Pelayanan Minimal (Spm) Bidang Kesehatan Kasus Hipertensi Dan Diabetes Mellitus Di Kota Bandung Tahun 2020. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja*, 46(2), 355–368. <https://doi.org/10.33701/jipwp.v46i2.1484>
- Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur. (2021). Profil Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur 2021. In *Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur*.
- Dinkes Jawa Timur. (2019). Profil Kesehatan Provinsi Jawa Timur 2019. *Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur*, 1–73. www.dinkesjatengprov.go.id
- Dinkes Jawa Timur. (2020). Profil Kesehatan Provinsi Jawa Timur 2020. *Dinas*

Kesehatan Provinsi Jawa Timur., tabel 53. www.dinkesjatengprov.go.id

UNDANG-UNDANG RI, 85 Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2014 2071 (2014).

Jaswin, E., Basri, H., & Fahlevi, H. (2019). Implementasi Penganggaran Berbasis Kinerja Dalam Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (Spm) Penyelenggara Pelayanan Kesehatan Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bener Meriah. *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*, 4(2), 284–299. <https://doi.org/10.24815/jped.v4i2.13023>

Kemendes RI. (2018). RISKESDAS 2018. *Kementerian Kesehatan RI*, 1(1), 1. <https://www.kemkes.go.id/article/view/19093000001/penyakit-jantung-penyebab-kematian-terbanyak-ke-2-di-indonesia.html>

Peraturan Pemerintah RI No. 02 tahun 2018, Kementerian Hukum dan HAM 1 (2018). <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/67029/pp-no-2-tahun-2018>

Rustandi, R. (2017). Kajian Teoritis Fungsi Pemerintah Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015. *Jurnal Surya Kencana Dua : Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan Vol. 4*, 4(1), 135–199.

Suartini, D. N., Syamsul, A., Jamal, B., Budi, A., & Keperawatan, J. (2020). *Implementasi Standar Pelayanan Minimal*.